

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 12
TAHUN 2017 DI DESA KASIKAN**

SKRIPSI



Oleh

**MURKASTARI
11427204038**

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
Lengkap BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 12
TAHUN 2017 DI DESA KASIKAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**MURKASTARI
11427204038**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA KASIKAN KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR yang ditulis oleh:

Nama : **Murkastari**
 NIM : 11427204038
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Agustus 2019

Pembimbing Skripsi

FIRDAUS, S.H., M.H.
 NIP. 19661002199403 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 di Desa Kasikan** yang ditulis oleh:

Nama : Murkastari
NIM : 11427204038
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Oktober 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, S.H, M.H
Sekretaris
Musrifah, S.H, M.H

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.A

Penguji II
Peri Pirmansyah, S.H, M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M. Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Nama : Murkastari

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 di Desa Kasikan

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kasikan secara runtut dan rinci serta menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tersebut ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan langsung turun ke lapangan melakukan observasi, wawancara, dengan bantuan angket dan dokumentasi. Untuk meruntutkan karya tulis ini penulis menggunakan analisa secara deskriptif kualitatif.

Program ini pada dasarnya diyakini dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan pendaftaran tanah. Namun di samping keberhasilan akan kemudahan yang dicapai, setelah penulis melakukan penelitian di lapangan, ditemukan bahwa ada beberapa hal dalam pelaksanaan PTSL di Desa Kasikan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dari total sepuluh tahapan PTSL yang dilaksanakan di Desa Kasikan, terdapat setidaknya empat tahapan (tahapan 1, 8, 9 dan 10) yang menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak terlaksana sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini tentunya disebabkan beberapa faktor, dalam hal ini penulis menemukan empat faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan PTSL di Desa Kasikan.

Kata kunci: Pendaftaran Tanah, PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak. Amiin.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selesainya penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 di Desa Kasikan” ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak kalangan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi selama proses penelitian dan penulisan.

Tentunya penulis mengakui banyak menemui kesulitan dan hambatan terutama pengumpulan literatur bahan dan pengolahan data. Namun, berkat bimbingan, motivasi, masukan serta dukungan dari berbagai pihak, alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat selesai. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua penulis ibunda Hj. Darwisyah dan ayahanda H. Abdul Manap (Alm), terima kasih atas semua dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis selama ini, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan juga dukungan baik moril maupun materiil, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Aku menyayangi kalian.
2. Prof. Dr. Ahmad Mujahidin, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. H. Hajar Hasan M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Firdaus, S.H., M.H, selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku pembimbing yang luar biasa yang telah memberikan ilmu, motivasi dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Henri Sayuti M.Ag, selaku pembimbing akademik penulis yang sudah membimbing penulis dari awal menjadi mahasiswa.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang selama ini telah memberikan berbagai ilmu pengetahuannya kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Desa Kasikan yang sudah membantu penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Dokter Indra Yopi, S.P, atas motivasi dan dukungannya sehingga penulis bisa memulai kuliah lagi hingga selesai.
10. Kepada kakak saya Suarni, adik saya Syafritur Rahmat, abang ipar saya Alkodri, dan keempat keponakan lucu saya Sakina, Jihan, Bilqis dan Dafhin, terima kasih karena sudah hadir dalam hari-hari bahagia dan sulit dalam hidup saya.
11. Kepada semua sepupu-sepupu saya terkhusus Nurhaiba dan Thoibatul Aisa dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih.
12. Kepada Shaha Elfina Ramadani, teman satu rumah dari PNDK sampai Skripsi yang setia mendengarkan semua keluhan saya.
13. Kepada semua teman sekelas saya di Ilmu Hukum C dan Hukum Tata Negara B, terkhusus sahabat-sahabat saya Ayu Sartika L, Cici Okta Azhari, Erza Fitriyah, Iim Juni Kaswanita, Isra Jum'atul H, Habibi Hamdani, Hendriko Fernando, Ilham Handhika Ramli dan Irfan Syahputra, thank you to be right people that make my mood, see you in PKM.
14. Semua sahabat-sahabat saya Maghfirah, Astrid Yolanda, Penny Maharani, Silvi Harni, Ayu Puspita, Indah Utari, dan Iin Purnama, thank you to be my best ever friend my loves.
15. Semua kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang ikut membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara moril maupun materiil.
16. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam segala keterbatasan seperti yang telah diungkapkan di atas, penulis tetap berusaha memberikan yang maksimal, karena keinginan untuk belajarlh yang mendorong terselesainya penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih banyak atas bantuannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan segala kerendahan hati.

Pekanbaru, 15 Agustus 2019

Penulis,

Murkastari

Nim: 11427204038

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. kondisi Geografi dan Demografi Desa Kasikan	20
B. Kondisi Pendidikan Desa Kasikan	23
C. Kondisi Kehidupan Beragama Desa Kasikan	26
D. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Kasikan	28
E. Kondisi Adat Istiadat Desa Kasikan	30
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah	31
B. Peran Pemerintah dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia	33
C. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah	34
D. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	44

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Program PTSL Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar 54
- B. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Program PTSL Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar 72

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 78
- B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

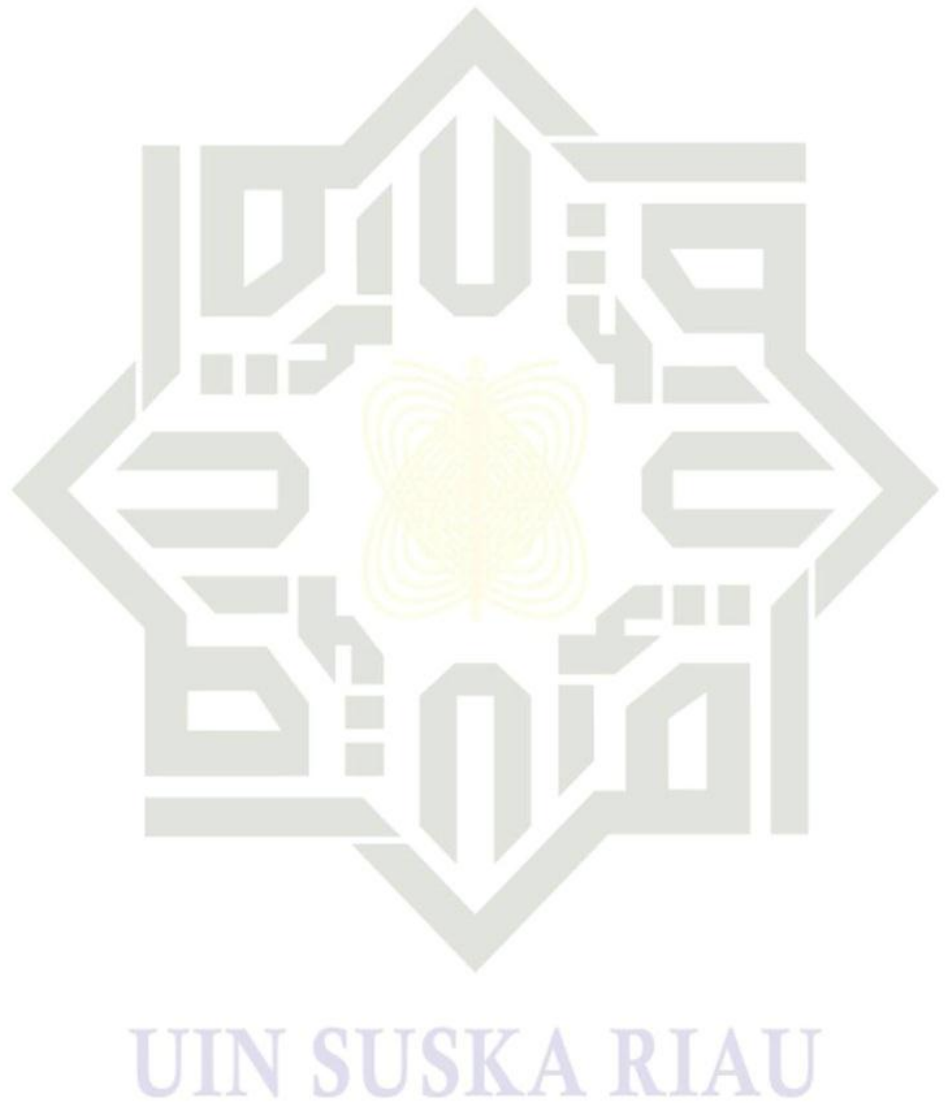
DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....	17
Tabel II.1 Klasifikasi Penduduk Desa Kasikan Menurut Jenis Kelamin	22
Tabel II.2 Klasifikasi Penduduk Desa Kasikan Menurut Kelompok Umur.....	23
Tabel II.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Kasikan.....	24
Tabel II.4 Klasifikasi Penduduk Desa Kasikan Menurut Tingkat Pendidikan ...	25
Tabel II.5 Klasifikasi Tempat Peribadatan Desa Kasikan	27
Tabel II.6 Klasifikasi Jumlah Pemeluk Agama Desa Kasikan	28
Tabel II.7 Klasifikasi Mata Pencarian Masyarakat Desa Kasikan	29
Tabel IV.1 Peserta/ Pemohon PTSL 2017 Sudah Pernahkah Melakukan Pendaftaran Tanah Sebelum Adanya Program Tersebut.....	54
Tabel IV.2 Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahap 1 di Kabupaten Kampar	58
Tabel IV.3 Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahap 1 di Kabupaten Kampar	59
Tabel IV.4 Keikutsertaan Peserta/ Pemohon PTSL Pada Saat Sosialisasi Yang Diadakan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar di Desa Kasikan.....	63
Tabel IV.5 Pendapat Peserta/ Pemohon PTSL Tentang Kehadiran di Saat Pelaksanaan Pengumpulan Data Fisik	64
Tabel IV.6 Pendapat Peserta/ Pemohon PTSL Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Data Yuridis	66
Tabel IV.7 Pertanyaan mengenai Peserta/ Pemohon PTSL Sudah atau Belum Mendapatkan Sertifikat Hak Atas Tanah	70
Tabel IV.8 Pendapat Peserta/ Pemohon PTSL Tentang Kepuasan Mereka Terhadap Program PTSL	71
Tabel IV.9 Pemahaman yang Didapat oleh Peserta/ Pemohon PTSL di Desa Kasikan Setelah Diadakannya Sosialisasi.....	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.10 Petanyaan Pengetahuan Peserta/ Pemohon Mengenai Program PTSL Tidak Dipungut Biaya atau Gratis	74
Tabel IV.11 Pendapat Peserta/ Pemohon Mengenai Biaya yang dipungut oleh Panitia PTSL Desa Kasikan	75
Tabel IV. 12 Pertanyaan Mengenai Terdapatnya Sengketa Pada Tanah Peserta/Pemohon PTSL.....	77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan dasar pembangunan nasional tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹

Pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan nasional salah satunya pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah yang merupakan suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh.² Salah satu sumber daya tersebut adalah dalam bidang pertanahan yang merupakan salah satu aspek pembangunan nasional.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan utama pembangunan nasional dalam bidang pertanahan, yang menyatakan bahwa; “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”³.

Atas dasar hal di atas dapat disimpulkan tanah sebagai salah satu hak negara, yang mana negara berkewajiban mempergunakannya dalam rangka pembangunan nasional dengan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Negara Indonesia telah menjamin hak rakyatnya sebagai negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak terkecuali.⁴

Implementasi dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kemudian lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau dikenal sebagai Undang-Undang

Sherley Veralin Kamurahan dkk, “Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Pembangunan Wilayah Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara”, Vol. 14 No. 1, Jurnal Ilmiah, (tt, Januari 2018), h. 390.

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 14.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). UUPA disusun berdasarkan delapan prinsip dasar sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum atas UUPA, yaitu:
 1. Asas kenasionalan (Pasal 1 jo. Pasal 9 Ayat (1) UUPA);
 2. Asas hak menguasai negara dan penghapusan pernyataan domain (Pasal 2 UUPA);
 3. Asas pengakuan hak *ulayat* (Pasal 3 UUPA) dan dasar pengakuan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional (Pasal 5 UUPA);
 4. Asas fungsi sosial hak atas tanah (Pasal 6 UUPA);
 5. Asas bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik (Pasal 9 jo. Pasal 21 Ayat (1) UUPA);
 6. Asas persamaan derajat laki-laki dan wanita (Pasal 9 Ayat (2) UUPA);
 7. Asas *agrarian reform* dan *landreform* (Pasal 7, 10, dan 17 UUPA);
 8. Asas perencanaan atas tanah (Pasal 14 UUPA).⁵
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penyusunan UUPA ini dilakukan untuk penyeragaman hukum tanah yang ada di Indonesia, karena sebelum diundangkannya UUPA ini terdapat dualisme peraturan mengenai pertanahan di Indonesia.

Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan diundangkannya UUPA dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu:

1. Tersedianya perangkat hukum tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya.

⁵ Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 1-2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.⁶

Perdaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena perndaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.⁷

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA dinyatakan sebagai berikut:⁸

1. Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
 - Perndaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

⁶ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 2.

⁷ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 152-153.

⁸ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
 4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
- Tujuan pemerintah mengadakan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pendaftaran tanah yang dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), melalui Pasal 19 mengamanatkan bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Bahwa Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat mengenai suatu penguasaan tanah.⁹
- Secara umum dapat dikatakan bahwa yang berhak memohon hak atas tanah di atas tanah tertentu ialah orang yang mempunyai hubungan hukum/kepentingan atas tanah tanah tertentu itu.¹⁰
- Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/ atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu
-
- ⁹ F.X. Sumarja, *Problematika Tanah Bagi Orang Asing*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012), h. 9-10.
- ¹⁰ Affendi Perangin, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, (Jakarta : Rajawali Press, 1991), h. 12.



© Hak Cipta
Dilindungi

digunakan untuk kepentingan bukan untuk mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.¹¹

Tanah yang tidak didaftarkan pada badan pertanahan beresiko bermasalah di masa depan. Salah satunya ialah pengklaiman tanah oleh pihak lain karena surat-surat yang tidak lengkap. Namun karena sulit dan panjangnya proses pendaftaran tanah yang selama ini harus didaftarkan sendiri oleh pemilik tanah. Apalagi apabila tanah itu adalah tanah adat atau tanah warisan yang belum pernah didaftarkan. Dalam melaksanakan dalam mewujudkan tanah terdaftar di seluruh Indonesia, pada kenyataannya belum menghasilkan hasil yang memuaskan.

Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah sering kali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tidak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).¹²

¹¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria (kajian Komprehensif)*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 10.

¹² Kominfo, Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan akan Sesuai Target, Artikel diakses tanggal 11 Februari 2019 dari https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 Tentang PTSL.¹³

Perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas dalam pelaksanaan PTSL telah tertuang dalam beragam regulasi, petunjuk teknis, surat edaran sebagai sarana kemudahan dalam pelaksanaan PTSL. Dalam pandangan Prayitno, untuk mempercepat program PTSL dilakukan beberapa terobosan diantaranya:

1. Melibatkan pihak swasta dalam proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
2. Mengatasi kekurangan petugas ukur Kementerian ATR/BPN;
3. Mengundang partisipasi perusahaan swasta dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR;
4. Mempersingkat masa pengumuman dari satu bulan menjadi 1 hari;
5. Menyediakan mekanisme BPHTB terutang bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

¹³ *ibid*



6. Surat keputusan bersama (SKB) Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan PTSL.¹⁴

Berhubungan dengan keterangan di atas, Desa Kasikan adalah salah satu desa yang ditunjuk menjadi lokasi PTSL. Desa ini terletak di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Mayoritas penduduknya memiliki lahan untuk berkebun sawit. Akan tetapi banyak diantara lahan tersebut masih berstatus tidak terdaftar dengan memiliki sertifikat hak atas tanah. Hal ini dikarenakan pada dasarnya lahan tersebut kebanyakan adalah warisan adat atau orang tua. Hal ini tentunya dengan adanya pelaksanaan program PTSL dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan haknya dalam kepemilikan tanah yang sah di mata negara.

Dalam hal penerapan ini terkadang banyak hal-hal yang tidak sesuai atau menyimpang yang menjadi penyebab hal ini sukar terjadi atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan tepat waktu. Hal seperti ini yang terjadi di Desa Kasikan, ada beberapa hal yang menjadi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan PTSL ini. Hal inilah yang menjadikan penelitian ini menarik minat saya untuk melihat pelaksanaann secara langsung program ini di masyarakat.

Proses dari program PTSL ini sudah berjalan dimulai dari awal tahun 2017, dan tugas desa adalah memfasilitasi hubungan pihak Badan Petahanan Nasional (BPN) dengan masyarakat. Ada panitia khusus yang dibentuk oleh desa Kasikan yang beranggotakan 3 orang, panitia ini bertugas untuk membantu masyarakat dalam program PTSL ini. Di Desa Kasikan terdapat 574 bidang tanah

¹⁴ Dian Aries Mujiburohman, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", Jurnal Ilmiah, (Yogyakarta, Mei 2018), h. 90.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdaftar untuk program PTSL dengan ketentuan maksimal 5 bidang/orang.¹⁵

Namun dikarenakan lambannya terselesaikan proses PTSL yang mengakibatkan hingga kini masyarakat belum juga menerima sertifikat tanah sebagai hasil dari program PTSL ini.

Dalam hal pembiayaan program PTSL di Kabupaten Kampar berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional¹⁶ Kabupaten Kampar Tahun 2017. Hal ini dapat diartikan jika tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Namun tetap diperbolehkan memungut biaya sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang mengatakan:

Dalam hal tidak tersedia anggaran untuk kegiatan dan/ atau pengeluaran yang wajib dibayar oleh pemilik tanah peserta PTSL, yang meliputi biaya pengadaan dan pemasangan patok tanda batas, biaya materai, biaya fotocopi berkas, biaya pengumuman tambahan, dan biaya administrasi kantor desa/ kelurahan maka pembiayaan dimaksud dapat dianggarkan melalui Peraturan Desa atau Peraturan Bupati/ Walikota yang bersangkutan.¹⁷

¹⁵ Al Hudri, Kepala Desa Kasikan, *Wawancara*, Kasikan, Rabu 5 Februari 2019.

¹⁶ Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

¹⁷ Pasal 34 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan jenis kegiatan, jenis biaya, dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut:¹⁸

1. Kegiatan penyiapan dokumen;
2. Kegiatan pengadaan Patok dan Materai;
3. Kegiatan operasional petugas kelurahan/ desa.

Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas, terdiri atas:¹⁹

1. Kategori I (Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp. 450.000,00;
2. Kategori II (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat) sebesar Rp. 350.000,00;
3. Kategori III (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Timur) sebesar Rp. 250.000,00;
4. Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp. 200.000,00;

¹⁸ Bagian Kesatu Surat keputusan bersama (SKB) Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan PTSL

¹⁹ *ibid*



5. Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp. 150.000,00.

Dengan adanya ketentuan di atas jelaslah Desa Kasikan yang terletak di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang termasuk dalam kategori IV dan dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,00.

Hal yang berbeda terjadi di Desa Kasikan, pada kenyataannya biaya yang dipungut oleh pihak Desa Kasikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya dugaan pungutan biaya-biaya yang tidak wajar dalam pelaksanaan PTSL di Desa kasikan, Kecamatan Tapung Hulu. Masyarakat yang merupakan peserta/ pemohon PTSL mengatakan adanya pembayaran biaya kepada pihak Desa Kasikan sebanyak Rp. 500.000,00 per bidang tanah yang didaftarkan. Pembayaran ini dilakukan secara langsung pada pihak desa dan tidak disertai bukti tertulis²⁰.

Pembagian sertifikat yang harusnya telah selesai paling lambat akhir tahun, dikarenakan pelaksanaan program ini merupakan program satu tahun anggaran. Namun berbeda yang terjadi di Desa kasikan bahkan sampai awal tahun 2019 sertifikat hak atas tanah masih belum juga sampai ke tangan masyarakat.

Hal ini kemudian menarik minat penulis untuk menyusun skripsi berjudul **“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 di Desa Kasikan”**.

²⁰ Suarni, Masyarakat Desa Kasikan yang Mengikuti Program PTSL, *Wawancara*, Kasikan, Sabtu 2 Februari 2019.

B. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan menjadi hal yang khusus agar terdapat data yang hanya tertuju pada satu permasalahan saja, maka pembahasan dibatasi pada pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Penelitian ini akan diteliti berdasarkan kesesuaian pelaksanaan PTSL dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran tanah yang diteliti hanya pada pelaksanaan PTSL pada tahun 2017 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

C. Rumusan masalah

Bagaimanakah pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar?

Bagaimanakah faktor-faktor penghambat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kasikan, kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program Strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
- b. Sebagai upaya untuk mendapatkan pengetahuan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kasikan.
- c. Sebagai upaya untuk mengetahui sudahkah pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kasikan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²¹ Dalam hal ini tentunya melihat Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara cermat²². Dalam hal ini mendeskripsikan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Penulis mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan beberapa alasan, pertama daerah ini merupakan tempat tinggal dari penulis jadi penulis secara langsung mengalami apa yang terjadi, alasan kedua karena penulis melihat adanya masalah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berakibat merugikan masyarakat.

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52.

²² Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Kepala Seksi Penataan Pertanahan BPN Kampar, 1 orang Kasubsi Penetapan Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat BPN Kampar, 1 orang Petugas Ukur BPN Kampar, 1 orang Kepala Desa Kasikan, dan 574 orang masyarakat peserta dalam program PTSL di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

Objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki di dalam kegiatan penelitian. Pendekatan objektif atau pendekatan ilmiah diterapkan dalam penelitian sistematis, terkontrol, empiris, kritis atas hipotesis mengenai hubungan yang diasumsikan diantara fenomena alam.²³

Objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan Program PTSL di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama²⁴, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Kepala Seksi Penataan Pertanahan BPN Kampar, 1 orang Kasubsi Penetapan Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat BPN Kampar, 1 orang

²³ Ibid, h. 23.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Petugas Ukur BPN Kampar, 1 orang Kepala Desa Kasikan, dan 574 orang masyarakat peserta dalam program PTSL di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari yang merupakan sumber data untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian²⁵ agar dapat menjawab masalah penelitian.

Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Kepala Seksi Penataan Pertanahan BPN Kampar, 1 orang Kasubsi Penetapan Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat BPN Kampar, 1 orang Petugas Ukur BPN Kampar, 1 orang Kepala Desa Kasikan, dan 58 orang masyarakat pemohon/peserta program PTSL di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

²⁵ Soejono Soekanto, *op.cit*, h. 121.

Tabel I.1

Populasi dan Sample

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
1.	Kepala Kepala Seksi Penataan Pertanahan BPN Kampar	1	1	100%	Total Sampling
2.	Kasubsi Penetapan Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat BPN Kampar	1	1	100%	Total Sampling
3.	Petugas Ukur BPN Kampar	1	1	100%	Total Sampling
4.	Kepala Desa Kasikan	1	1	100%	Total Sampling
5.	Masyarakat Peserta Program PTSL	574	58	10%	Purposive Sample
JUMLAH		578	62	-	-

Sumber: Data Lapangan, 2019

5. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Sumber data primer 1 orang Kepala Kepala Seksi Penataan Pertanahan BPN Kampar, 1 orang Kasubsi Penetapan Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat BPN Kampar, 1 orang Petugas Ukur BPN Kampar, 1 orang Kepala Desa Kasikan, dan 58 peserta dalam program PTSL di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung. Adapun data sekunder dari penelitian ini berasal dari literatur-literatur buku pustaka maupun online yang berkaitan dengan pelaksanaan program PTSL di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Teknik Pengumpulan Data

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran dalam penelitian.

Wawancara yaitu tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan subjek dalam penelitian yaitu 1 orang Kepala Kepala Seksi Penataan Pertanahan BPN Kampar, 1 orang Kasubsi Penetapan Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat BPN Kampar, 1 orang Petugas Ukur BPN Kampar, 1 orang Kepala Desa Kasikan untuk melengkapi data mengenai pelaksanaan PTSL di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

c. Angket, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membagikan atau menyebarkan daftar pertanyaan yang dibuat secara sistematis yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian kepada dan 58 peserta dalam program PTSL di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci, yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan.²⁶

Dalam hal ini penulis menganalisis fakta-fakta dan data-data dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan aturan-aturan yang ada, sehingga tercapai kesimpulan yang baik diakhir.

²⁶ Soejono Soekanto, *op.cit*, h.112

BAB II

LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Kasikan

Desa kasikan adalah salah satu desa di antara beberapa desa yang terletak di Kecamatan Tapung Hulu yang jaraknya lebih kurang 35 Km dari pusat kecamatan, lebih kurang 95 Km dari pusat Kabupaten, dan lebih kurang 155 Km dari ibu kota Propinsi. Desa Kasikan merupakan desa paling ujung sebelum Desa Talang Danto yang berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, dengan luas wilayah 22.700 Ha, dengan jumlah, 6281 KK dan 25.455 jiwa.²⁷

Menurut data di Kantor Kepala Desa Kasikan yang luas wilayahnya 22.700 Ha dengan jumlah penduduk 25.455 jiwa, batas-batas wilayah Desa Kasikan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Danto
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Tapung
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukaramai
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Sawit BOB PT. BSP Pertamina Hulu.

Dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat Desa Kasikan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Dusun, RW, dan RT. Di Desa Kasikan 5 Dusun, 10 RW, dan 48 RT, yang terbesar diseluruh Desa Kasikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah Desa Kasikan yang masyarakatnya penuh dengan keberagaman.

²⁷Data Fisik di Kantor Desa Kasikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Desa Kasikan sehari-sehari memenuhi kebutuhan dengan berbagai pekerjaan, baik yang bertani, berdagang dan sebagainya, dan untuk pemasaran hasil pertanian, produksi serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semua telah tersalurkan dan tersedia di Desa, kecamatan, dan Ibukota Kabupaten yang letaknya tidak jauh dan dapat dijangkau oleh transportasi darat, dimana pada pasar umum dan pertokoan yang semakin hari pembangunannya semakin maju dan berkembang.

Adat Istiadat di Desa Kasikan masih kental, dimana masyarakatnya masih mematuhi aturan adat yang ada, salah satunya masalah pembagian harta warisan, dimana adat yang banyak digunakan di Desa Kasikan adalah sistem matrilineal (menurut keturunan ibunya).

Sedangkan di bidang kesehatan, di Desa Kasikan terdapat 1 Puskesmas, selain puskesmas ada juga posyandu yang dibuka setiap minggu ke tiga pada setiap bulannya, selain itu juga sudah terdapat praktek dokter ataupun apotek yang merupakan milik pribadi.

Masyarakat Desa Kasikan terdidiri dari 5 Suku yaitu : Suku Minang, Suku Jawa, Suku Melayu, Suku Batak dan Suku Nias. Dari suku suku tersebut mayoritas masyarakatnya bersuku Melayu. Zaman sekarang penduduk Desa Kasikan sudah berpikir maju dari sebelumnya, dan banyak menduduki pendidikan sampai perguruan tinggi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah penduduk yang bermukim di Desa Kasikan dengan jumlah 25.455 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 14.210 jiwa, dan perempuan 11.245 jiwa.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut :²⁸

Tabel II.1
Klasifikasi Penduduk Desa Kasikan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	14.210	55,86 %
2.	Perempuan	11.245	44, 24 %
	Jumlah	25.455	100 %

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Kasikan Tahun 2018

Data pada table diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, yaitu laki-laki 14210 jiwa atau 55,86 % dan jumlah perempuan 11.245 jiwa atau 44,24 % dari jumlah penduduk yang berdomisili di Desa Kasikan.

Sedangkan menurut umur, penduduk Desa Kasikan sampai tahun 2018 lebih banyak yang berusia 0-15 tahun. Secara rinci dapat dilihat dalam table berikut ini:²⁹

²⁸ Data di Kantor Kepala Desa Kasikan Tahun 2018

²⁹ Data di Kantor Kepala Desa Kasikan Tahun 2018

Tabel II.2

Klasifikasi Penduduk Desa Kasikan Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Presentase
1.	0 – 15	7.671	30,21 %
2.	16 – 25	5.093	20,04 %
3.	26 – 35	3.344	13,14 %
4.	36 – 45	3.033	11,91 %
5.	46 – 55	3.455	13,58 %
6.	56 – keatas	2.859	11,23 %
	Jumlah	25.455	100 %

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Kasikan Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk yang berusia 0-15 tahun sebanyak 7.671 orang atau 30,21%, 16-25 tahun sebanyak 5.093 orang atau 20,04%, 26-35 tahun sebanyak 3.344 orang atau 13,14%, 36-45 tahun sebanyak 3.033 orang atau 11,91%, 46-55 tahun sebanyak 3.455 orang atau 13,58% sedangkan 56 tahun ke atas adalah 2.859 orang atau 11,23%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk di Desa Kasikan mayoritas berusia 0-15 tahun dan yang paling sedikit adalah penduduk yang berusia 56 tahun keatas.

B. Kondisi Pendidikan Desa Kasikan

Pendidikan merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan perorangan, keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Karena maju mundurnya suatu Bangsa dan Negara dapat ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan di Bangsa ataupun Negara itu sendiri.

Adapun prasarana sebagai penunjang pendidikan di Desa Kasikan telah penulis sebutkan di atas, tetapi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.³⁰

Tabel II.3
Sarana Dan Prasarana Pendidikan di Desa Kasikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	2 unit
2.	TK	3 unit
4.	SD	5 unit
5.	MI	1 unit
6.	SMP	2 unit
7.	MTS	1 unit
8.	SMA	2 unit
9.	Pondok Pesantren	1 unit
	Jumlah	17 unit

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Kasikan Tahun 2018

Dalam mewujudkan pendidikan tersebut, telah dibangun sarana dan prasarana di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu sebagai lembaga pendidikan berupa 2 (dua) unit gedung pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 3 (tiga) unit gedung Taman Kanak-Kanak (TK), 5 (lima) unit gedung Sekolah Dasar (SD), 1 (satu) unit gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 (satu) unit gedung Madrasah Diniah Takmiliyah (PDTA), 2 (dua) unit gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 (satu) unit gedung Madrasah Tsanawiyah (MTS), 1 (satu) unit Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1 (satu) unit Pondok Pesantren (Ponpes).

³⁰ Tipografi Desa Kasikan 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taraf pendidikan penduduk di Desa Kasikan sudah mulai meningkat dari tahun ke tahun, hal ini terbukti sudah banyak masyarakatnya yang lulusan perguruan tinggi baik Strata satu (S1) maupun Magister (S2), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :³¹

Tabel II.4
Klasifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Kasikan
menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	Belum Sekolah	3.465	13,62 %
2.	Tidak Tamat TK	3.568	14,02 %
3.	Tidak Tamat SD	2.097	8,24 %
4.	Tamat SD	5.429	21,36 %
5.	Tamat SLTP/ Sederajat	5.693	22,37 %
6.	Tamat SLTA/Sederajat	3.372	13,26 %
7.	Tamat Akademik (D1-D3)	852	3,34 %
8.	Tamat S1	974	3,82 %
9.	Tamat S2	5	0,019 %
	Jumlah	25.455	100 %

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Kasikan Tahun 2018

Jika dilihat dari tabel diatas maka pendidikan masyarakat Desa Kasikan yang belum sekolah sejumlah 3.465 jiwa, yang tidak mampu tamat SD sejumlah 3.568 jiwa, yang berpendidikan tingkat SD berjumlah 5.429 jiwa, berpendidikan SLTP/ Sederajat berjumlah 5.693 jiwa, dan berpendidikan SLTA/ Sederajat sejumlah 3.372 jiwa, sementara masyarakat yang berpendidikan sampai dengan perguruan tinggi sejumlah 1.831 jiwa. Meskipun demikian, banyak juga masyarakatnya yang sudah sampai tamat perguruan tinggi (sarjana).

³¹ Data di Kantor Desa Kasikan Tahun 2018



C. Kondisi Kehidupan Beragama Desa Kasikan

Agama bagi manusia merupakan kebutuhan fitrah yang sangat penting, karena agama merupakan pedoman/ arahan bagi manusia dalam menjalani hidup dengan baik dan benar, karena tanpa agama manusia terombang ambing oleh kehidupan dan kebahagiaan yang bersifat duniawi dan tidak mengingat akan adanya akhirat. Dalam masyarakat Desa Kasikan penduduknya hampir 90 % menaati agama Islam, sebagai agama yang telah diwariskan dan telah diajarkan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Sehingga masyarakat Desa Kasikan dengan hidup beragama mereka menjadi rukun, namun bukan berarti tidak ada agama lainnya. Walaupun penduduk Desa Kasikan hidup berdampingan dengan agama yang berbeda, mereka hidup dengan saling menghormati satu dengan yang lainnya.

Masyarakat yang hidup di Desa Kasikan baik yang beragama Islam dan non-Islam saling harga menghargai, saling hormat menghormati, dan saling membantu dalam masalah sosial.

Adapun sarana untuk menunjang peribadatan di Desa Kasikan cukup memadai, hal ini terbukti dengan adanya bangunan-bangunan rumah ibadah, seperti Masjid dan tempat ibadah lainnya, yang dipergunakan untuk tempat ibadah, disamping itu dipergunakan juga sebagai tempat pengajian, bermusyawarah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :³²

³² Tipografi Desa Kasikan 2018

Tabel II.5
Klasifikasi Tempat Peribadatan di Desa Kasikan

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1 unit
2.	Mushalah	9 unit
3.	Gereja	4 unit
	Jumlah	14 unit

Sumber Data : Monografi Desa Kasikan Tahun 2018

Dari table di atas, keberadaan Masjid dan Mushalla di Desa Kasikan cukup memadai sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas beragama. Masyarakat juga merasa satu dengan yang lainnya ada keterikatan, sehingga apabila ada suatu masalah dapat dimusyawarahkan bersama-sama, selain Masjid dan Musholla sebagai wadah berkumpulnya jama'ah, juga sebagai tempat melaksanakan kegiatan pendidikan keagamaan, seperti :

1. Pendidikan anak-anak dalam membaca Al-Qur'an
2. Tempat belajar seni Al-Qur'an
3. Mengadakan wirid pengajian bagi kaum ibu dan kaum bapak

Kalau dilihat dari segi keyakinan (agama), maka Agama Islam adalah agama mayoritas. Disamping itu ada agama-agama yang lain, seperti Kristen protestan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :³³

³³ Data di Kantor Desa Kasikan 2018

Tabel II.6
Klafikasi Jumlah Pemeluk Agama Desa Kasikan

No	Agama	Jumlah	Presentase
1.	Islam	20.589	81,30 %
2.	Protestan	4.148	16,31 %
3.	Katolik	718	2,82 %
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
6.	Kongucu	-	-
	Jumlah	25.455	100 %

Sumber Data: Monografi Desa Kasikan tahun 2018

Dari tabel diatas nampaknya bahwa masyarakat Desa Kasikan mayoritas memeluk agama Islam, yaitu 20.589 jiwa atau 81,30 %. Disamping itu ada agama lain yang hidup berdampingan bersama mereka. Walaupun jumlahnya sedikit (minoritas) namun hak-hak mereka dalam masyarakat tetap sama. Agama Protestan dengan jumlah 4.148 jiwa atau 16,31% dan Katolik sejumlah 718 jiwa atau 2,82%, sedangkan agama Katolik, Hindu, Budha dan Kongucu tidak ada.

D. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Kasikan

Sumber Ekonomi masyarakat Desa Kasikan adalah bertani, namun ada juga yang berdagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel ini :³⁴

³⁴ Data di Kantor Desa Kasikan 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.7
Klasifikasi Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kasikan

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1.	Petani	6.284	24,57 %
2.	Pedagang	2.302	9,04 %
3.	PNS	1.237	4,86 %
4.	POLRI/ TNI	22	0,086 %
5.	Guru	1.368	5,37 %
6.	Buruh	3.871	15,22 %
7.	Lainnya	1.058	4,15 %
8.	Belum Bekerja	9.313	36,63 %
	Jumlah	25.455	100 %

Sumber Data: Monografi Desa Kasikan tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas Desa Kasikan adalah petani dan mata pencaharian mereka adalah bertani. Disamping bertani ada juga yang berdagang sebagai tambahan hasil utama mereka.

Bertani (kebun sawit) adalah mata pencaharian yang umum bagi masyarakat Desa Kasikan dengan jumlah 6.284 orang atau 24,57% pedagang dengan jumlah 2.302 orang atau 9,04%, PNS dengan jumlah 1.237 orang atau 4,86%, guru dengan jumlah 1.368 orang atau 5,37%, TNI/POLRI 22 orang atau 0,086 % buruh 3.871 orang atau 15,22% dan yang berkerja pada bidang pekerjaan lainnya dengan jumlah 1.058 atau 4.15% serta yang belum bekerja sebanyak 9.313 orang atau 36,63% termasuk anak-anak.

E. Kondisi Adat Istiadat Desa Kasikan

Penduduk Desa Kasikan adalah masyarakatnya yang heterogen, yang mayoritas penduduknya adalah suku minang dan melayu, sebagai suku asli masyarakat Desa Kasikan. Adapun suku yang lain seperti : minang, jawa, batak toba dan lain sebagainya adalah pendatang dari berbagai daerah. Seperti : pulau Jawa, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan lain sebagainya. Dari tempat asal, mereka membawa adat istiadat dan tradisi yang berbeda dengan penduduk asli setempat. Namun, hal itu tidak menjadi perpecahan bagi masyarakat Desa Kasikan, karena pada umumnya adat yang dibawa oleh masyarakat pendatang tidak jauh berbeda, sehingga mereka tidak membedakan antara satu suku dengan suku yang lain. Mereka hidup rukun dan damai. Namun, dalam pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan sesuai adat masing-masing.³⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Nasri, Tetua Adat Masyarakat Desa Kasikan, *Wawancara*, Kasikan, Sabtu 28 Februari 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran *Positivisme* di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 58.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁷
- Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, peraturan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.
- Adapun tujuan pokok dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah:³⁸
1. Untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
 2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum agraria.
-
- ³⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999), h. 23.
- ³⁸ H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 18-19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia

B. Peran Pemerintah dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia

Dari segi yuridis, proklamasi kemerdekaan merupakan saat tidak berlakunya hukum kolonial dan saat berlakunya hukum nasional, sedangkan dari segi politis, proklamasi kemerdekaan mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi kemerdekaan RI memiliki dua arti penting bagi penyusunan Hukum Agraria nasional, yaitu pertama, Bangsa Indonesia memutuskan hubungannya dengan Hukum Agraria Nasional, dan kedua, Bangsa Indonesia sekaligus menyusun Agraria Nasional.³⁹

Pada tahun 1960 bangsa kita memasuki suatu babak baru dalam bidang pertanahan atau agraria, karena pada tahun ini baru pertama kali membuat produk hukum yang menyangkut perkembangan pertanahan di Indonesia. Dengan berlakunya UUPA sejak tanggal 24 September 1960, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1960 Nomor 104, maka tercapailah unifikasi hukum dalam bidang hukum agraria di Indonesia. UUPA ini disusun berdasarkan hukum adat, oleh karena itu hukum agraria adat mempunyai peran penting dalam sejarah lahirnya UUPA.⁴⁰

³⁹Urip Santoso, *op.cit*, h. 31.

⁴⁰H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2014) h. 283.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 19 UUPA menentukan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, penyelenggaraan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Badan Pendaftaran Tanah (Pasal 1). Sedangkan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 5 menentukan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, maka tugas penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.⁴¹

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 secara tegas menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Pasal 5-nya yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), selanjutnya Pasal 6 ayat (1)-nya ditegaskan bahwa dalam rangkapendaftaran tanah tersebut, tugas pelaksanaanya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.⁴²

C. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah

1. Landasan Hukum Pendaftaran Tanah

Tanah memiliki peranan yang penting dalam masyarakat, karena itulah setiap orang berusaha memiliki hak atas tanah untuk kehidupannya.

Hal ini secara mendasar tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “bumi, air dan kekayaan alam

⁴¹H.M. Arba, *op.cit*, h. 159-160.

⁴²Urip Santoso, *op.cit*, h. 31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kemudian masalah pertanahan secara pokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Didalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Ketentuan tersebut diajukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan berhak mendaftarkan tanahnya dengan tujuan untuk memperoleh tanda bukti sah berupa sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat sebagai pemegang hak atas tanahnya.⁴³

Posisi pendaftaran tanah yang merupakan bagian dari urusan agraria kemudian mengacu pada UUPA, ketentuan pendaftaran tanah pada UUPA terdapat dalam Pasal 19. Aturan ini kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, lahirnya peraturan pelaksana ini menjadi jawaban akan kebutuhan kepastian hukum pada para pemilik tanah. Mengingat pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 untuk pertama

⁴³ Bachtiar Effendy, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pelaksanaannya*, (Bandung: Alumnus, 1993), h. 10.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya Indonesia mempunyai suatu lembaga tanah, hal ini tambah sempurna dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sebelum adanya kedua produk hukum ini, dikenal Kantor Kadaster sebagai Kantor Pendaftaran untuk hak-hak atas tanah.⁴⁴

Lahirnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk membantu pelaksanaan dari pendaftaran tanah secara sistematis lengkap yang merupakan program pemerintah.

2. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah ialah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah yang ada di wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya.⁴⁵

Meskipun UUPA mengatur pendaftaran tanah, namun tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, juga tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.112.

⁴⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h.72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendaftaran tanah. Menurut A.P. Parlindungan pendaftaran tanah berasal dari kata *Cadastre* (bahasa Belanda cadaster) suatu istilah teknis untuk suatu *record* (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa lain, “*Capistratum*” yang berarti suatu *register* atau *capita* atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (*Capotatio Terrens*).⁴⁶

Pengertian pendaftan tanah baru dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi: pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁴⁷

Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang meliputi: pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.

⁴⁶ Urip Santoso, *op. cit*, h. 286.

⁴⁷ Urip Santoso, *op. cit*, h. 287.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan Pendaftaran Tanah

Tujuan pendaftaran tanah dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, yaitu:⁴⁸

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 19 UUPA. Maka memperoleh sertipikat, bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijaminakan oleh undang-undang.

Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi:

- a. Kepastian status hak yang didaftar, artinya dengan pendaftaran tanah akan diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak tanggungan, hak milik atas satuan rumah susun atau tanah wakaf.
- b. Kepastian subjek hak, artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti pemegang haknya, apakah perorangan (warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia),

⁴⁸ Urip Santoso, *op. cit*, h. 292-294.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum privat atau badan hukum publik).

- c. Kepastian objek hak, artinya pendaftaran tanah dapat diketahui dengan pasti letak tanah, batas tanah, dan ukuran (luas) tanah. Letak tanah berada di jalan, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi mana, batas-batas tanah meliputi sebelah utara, selatan, timur dan barat berbatasan dengan tanah siapa dan tanah apa. Ukuran (luas) tanah dalam meter persegi.

Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

Untuk melaksanakan fungsi informasi, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.

Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

Program pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan Catur Tertib Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, dan Tertib Pemeliharaan Tanah dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Menurut A.P. Parlindungan jika dikaitkan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 maka dapat memperkaya ketentuan Pasal 19 UUPA, karena:⁴⁹

Dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Dengan Informasi pertanahan yang tersedia di Kantor Pertanahan maka pemerintah akan mudah merencanakan pembangunan Negara yang menyangkut tanah, bahkan bagi rakyat sendiri lebih mengetahui kondisi peruntukan tanah dan kepemilikannya.

- b. Dengan administrasi pertanahan yang baik akan terpelihara masa depan pertanahan yang terencana.

4. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa yang mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah pemerintah. Dokumen-dokumen yang terkait dalam rangka pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu:⁵⁰

Daftar tanah, adalah dokumen yang dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.

⁴⁹ A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), h.112.

⁵⁰ Urip Santoso, *op.cit*, h. 292.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat ukur, adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

Daftar nama, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan fisik dengan suatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai kepemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.

Buku tanah, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.⁵¹

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan dengan dua cara.⁵²

Pendaftaran secara tanah sistematis, adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan secara serentak meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran secara tanah sistematis

⁵¹ Flavianus Darman, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, (Jakarta: Transmedia Pustaka), 2009, h. 23.

⁵² *Ibid*, h. 23-25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri.

Pendaftaran tanah secara sporadik, adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagaian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

5. Sertifikat Sebagai Bukti Hak

Secara etimologi sertifikat berasal dari bahasa Belanda “*Certificat*” yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. Jadi kalau dikatakan sertifikat tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat oleh instansi yang berwenang, inilah yang disebut sertifikat tanah.⁵³

Ditinjau secara fisik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka yang dimaksudkan dengan sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat

⁵³ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002), h. 204.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kur, diberi sampul dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.⁵⁴

Kemudian pengertian sertifikat disebutkan dalam UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf c yaitu “Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.” Meskipun dalam UUPA tidak pernah disebut sertifikat tanah, namun seperti yang dijumpai dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c ada disebutkannya “surat tanda bukti”. Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini sudah sering ditafsirkan sebagai sertifikat tanah. Sebagai peraturan pelaksana UUPA persamaan istilah tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (20) yaitu “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”⁵⁵

⁵⁴Ibid, h. 123.

⁵⁵Mhd.Yamin Lubis & Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, (Bandung : CV.Mandar Maju, 2010), h. 203.

D. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

1. Landasan Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.⁵⁶

Untuk percepatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA perlu dilaksanakan pendaftaran tanah pertama kalinya secara massal melalui Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merupakan salah satu Program Prioritas Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.⁵⁷

2. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam wilayah desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan

⁵⁶ Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrarian, *Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis*, (Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, 2017), h. 1.

⁵⁷ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.⁵⁸

Pelaksanaan PTSL ini dilaksanakan dengan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu:⁵⁹

Sistematis lengkap

- 1) Desa/kelurahan PTSL dengan cara memilih beberapa desa yang jumlah bidang tanah yang belum terdaftarnya tinggal sedikit dan/atau yang dapat dibiayai dengan anggaran yang ada; atau
- 2) Kota/kabupaten PTSL bagi kota/kabupaten yang jumlah bidang tanah yang belum terdaftarnya kurang dari 10.000 bidang tanah dan/atau sejumlah bidang tanah tertentu yang dapat dibiayai dengan anggaran yang ada; dan
- b. Sporadis berkelompok menuju sistematis lengkap secara bertahap demi desa dan kelurahan demi kelurahan dalam kecamatan-kecamatan pada setiap kota/kabupaten.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan PTSL ini maka Kepala Kantor Pertanahan menetapkan penyebaran target PTSL yang terkonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam suatu provinsi secara bertahap, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan

⁵⁸ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

⁵⁹ <http://www.atrbpn.go.id>, diakses tanggal 2 Mei 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.⁶⁰

3. Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tujuan dilaksanakannya program PTSL ini adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.⁶¹

4. Alur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dalam Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, disebutkan bahwa pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan:

Perencanaan dan persiapan;

Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber di dalamnya termasuk manusia, dana, kemampuan organisasi, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta (individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan). Sebagai pendekatan untuk pengambilan keputusan, yang

⁶⁰<http://www.atrbpn.go.id>, diakses tanggal 2 Mei 2019

⁶¹Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhitungkan baik keputusan yang fundamental maupun keputusan yang inkramental dan memberikan urutan teratas bagi proses pembuatan kebijakan fundamental yang memberikan arahan dasar dan proses-proses pembuatan kebijaksanaan dan inkramental yang melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan ini tercapai.⁶²

Penetapan lokasi kegiatan PTSL;

Berkaitan dengan penetapan lokasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 dikatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi PTSL di wilayah kerjanya. Diantaranya berdasarkan ketersediaan anggaran khusus PTSL yang telah dialokasikan dalam APBN/APBD, diprioritaskan terhadap lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan PRONA/PRODA, dana desa, lintas sektor massal swadaya masyarakat, Corporate Social Responsibility (CSR), dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya, atau atas berdasarkan ketersediaan dana yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk satu desa/kelurahan PTSL dan mempertimbangkan ketersediaan peta kerja, ketersediaan dan kemampuan optimal pelaksana PTSL pada masing-masing Kantor Pertanahan. Penetapan lokasi tersebut diupayakan di desa/kelurahan yang menjadi objek PTSL letaknya berdekatan.⁶³

Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;

⁶² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 19.

⁶³ Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya pembentukan panitia adjudikasi PTSL yang dimuat dalam Pasal 8, yang mana adanya pembagian tugas masing-masing agar program PTSL ini dapat berjalan sebagai mana mestinya. Tugas dari panitia adjudikasi PTSL inipun dimuat secara rinci dalam Pasal 9 yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Menyiapkan rencana kerja PTSL;
- 2) Mengumpulkan Data Fisik dan dokumen analisis Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- 3) Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Memeriksa kebenaran formal Data Fisik dan Data Yuridis alat bukti kepemilikan dan penguasaan tanah;
- 5) Mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
- 7) Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hakserta pendaftaran hak;

⁶⁴Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
- 9) Melakukan survei pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis.

Penyuluhan;

Penyuluhan dilakukan oleh Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudiasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan penjelasan paling sedikit mengenai:⁶⁵

- 1) Manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil pelaksanaan program PTSL;
- 2) Tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL;
- 3) Penetapan dan pemasangan tanda batas-batas masing-masing bidang tanah;
- 4) Dokumen yuridis yang perlu disiapkan;
- 5) Jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis;
- 6) Hasil akhir kegiatan program PTSL;
- 7) Pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah melalui kegiatan PTSL; dan
- 8) Kemungkinan biaya dan/atau pajak yang ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL.

Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;

⁶⁵ Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP, alas hak dan surat keterangan kepemilikan atau surat pernyataan penguasaan fisik atas tanahnya.⁶⁶

Pengumpulan data yuridis dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan tugas, Satgas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpulan Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

f. Pemeriksaan tanah;

Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan di dalam data yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan. Dilakukan dengan cara menggali informasi yang meliputi kesesuaian nama dan profesi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Membandingkan keterangan yang tertera di dalam formulir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kesesuaian dengan kondisi penguasaan,

⁶⁶ Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

⁶⁷ Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan tanah tersebut di lapangan, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik (Peta Bidang Tanah) dengan kenyataan di lapangan. Hasil pemeriksaan dimuat dalam Daftar Iasian sesuai dengan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas.⁶⁸

Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;

Dalam hal bidang tanah yang menjadi objek PTSL merupakan tanah negara maka dibuktikan dengan:

- 1) Surat atau dokumen yang menunjukkan bukti penguasaan fisik yang dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- 2) Surat perjanjian sewa atau perjanjian lainnya, dalam hal tanah garapan dimanfaatkan oleh pihak lain atas dasar sewa atau perjanjian lain; dan
- 3) Keterangan tanah yang bersangkutan tidak termasuk dalam kawasan hutan.⁶⁹

Dalam hal bidang tanah yang menjadi objek PTSL merupakan tanah bekas Milik Adat maka kepemilikannya dibuktikan dengan *asli Girik, Pipil, Petuk, Verponding* Indonesia atau sebutan lain yang sama

⁶⁸ Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Kegrarian, *op. cit.*, h. 14

⁶⁹ Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau berlaku di daerah setempat atas nama subjek atau pihak yang berhak Hak atas Tanah peserta Ajudikasi PTSL.⁷⁰

Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak adasama sekali maka dapat dilengkapi dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.⁷¹

Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;

Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menetapkan keputusan penetapan hak atau keputusan penegasan/pengakuan hak. Untuk penerbitan keputusan pemberian hak peserta PTSL harus melampirkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPh) pada saat pendaftaran hak. Dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu membayar BPHTB maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan BPHTB terhutang.⁷²

Pembukuan dan penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah; dan

Terhadap tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses pendaftaran tanahnya, dibukukan dalam daftar umum Pendaftaran Tanah dan daftar lainnya, dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL. Penandatanganan Sertifikat Hak atas Tanah tersebut

⁷⁰ Pasal 18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

⁷¹ Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

⁷² Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatas merupakan hasil pelaksanaan program Ajudikasi PTSL dapat dilaksanakan oleh Ketuan Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan .⁷³

Penyerahan Sertifikat Hak atas Tanah.

Panitian Ajudikasi Percepatan Bidang Yuridis menyiapkan/mencetak Sertifikat Hak atas Tanah. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan menandatangani Sertifikat Hak atas Tanah atau dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan kepada Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan. Panitian Ajudikasi Percepatan menyerahkan Sertifikat Hak atas Tanah kepada pemegang hak atau kuasanya dengan mencatatkan dalam Daftar Isian Penyerahan Sertifikat.⁷⁴

⁷³ Pasal 25 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

⁷⁴ Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, *op. cit*, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tanah yang belum bersertifikat yang berlokasi di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tahun 2017 dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Daftar Isian Program Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017. Pelaksanaan PTSL tersebut bisa dikatakan cukup membantu masyarakat Desa Kasikan, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengaku merasa terbantu dengan pendaftaran tanah ini. Namun di samping keberhasilan akan kemudahan yang dicapai, ada beberapa hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah dikonsepskan oleh aturan yang berlaku. Dari total sepuluh tahapan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di Desa Kasikan, terdapat empat tahapan (tahapan 1, 8, 9 dan 10) yang menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak terlaksana sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pelaksanaan Program

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar ini belum sepenuhnya terealisasi dengan baik, ini dibuktikan dengan apa yang terjadi pada kenyataannya, masyarakat belum kunjung mendapatkan hasil dari Program PTSL ini berupa Sertifikat Hak atas Tanah. Padahal program ini sudah mulai dilaksanakan pada awal 2017. Namun pada tahun 2019 ini tepatnya bulan Mei sudah ada beberapa peserta/ pemohon PTSL yang mendapatkan haknya dari kegiatan tersebut, meskipun sertifikat yang dibagikan belum keseluruhan. Jadi pelaksanaan ini juga tidak bisa dikatakan selesai karena dari total 574 bidang tanah yang dijanjikan akan mendapatkan sertifikat hak atas tanah, masih ada setengah dari peserta/pemohon PTSL yang belum mendapatkan hak mereka.

2. Ketidaksesuaian yang terjadi pada empat tahap (tahapan 1, 8, 9 dan 10) tersebut dipengaruhi oleh hambatan-hambatan yang dialami dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tanah yang belum bersertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang berlokasi di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar meliputi: tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah dalam hal pendaftaran tanah, masih kurangnya dalam hal anggaran biaya oleh pemerintah, peralatan lapangan yang kurang memadai dan sumber daya manusia yang tidak mencukupi, adanya beberapa tanah yang masih ada permasalahan/sengketa, sehingga tidak tepat waktunya sertifikat hak atas tanah sampai kepada masyarakat.



Saran

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar disarankan meningkatkan penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang pertanahan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat di masa yang akan datang. Serta berkoordinasi dengan pemerintahan daerah dan berbagai pihak agar hambatan-hambatan yang dialami dapat diminimalisir di masa yang akan datang. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal khususnya dalam hal pendaftaran tanah. Pemerintah Desa Kasikan disarankan untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih tepat dan baik. Dan untuk masyarakat Desa Kasikan agar lebih banyak membuka diri pada kebijakan-kebijakan pemerintah terbaru agar dapat menerima hasil yang maksimal dengan pemahaman yang lebih tepat dan baik sehingga tidak dirugikan secara sepihak.

Penulis berpendapat kerja sama yang baik dan terorganisir akan meminimalisir hambatan-hambatan yang ditemukan saat pelaksanaan suatu kebijakan khususnya pendaftaran tanah. Masing-masing peran berusaha mengerjakan tugasnya dengan baik, dan tetap saling berhubungan dan membantu. Baik antara BPN pusat maupun daerah serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arba, H.M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Arisanputra, Muhammad Ilham. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2002.
- Darman, Flavianus. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2009.
- Effendy, Bachtiar. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni. 1993.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan. 2007.
- . *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan. 2008.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2014.
- Lubis, Mhd.Yamin dan Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Parliandungan, A.P. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Perangin, Affendi. *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Rajawali Press. 1991.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaharani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya. 1999.

Antoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencan. 2010.

———. *Hukum Agraria (kajian Komprehensif)*. Jakarta: Kencana. 2012.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Sumarja, F.X. *Problematisa Tanah Bagi Orang Asing*. Bandar Lampung: Indepth Publishing. 2012.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Surat Keputusan bersama (SKB) Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan PTSL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Sumber Lainnya

Kamurahan, Sherley Veralin, dkk. “Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Pembangunan Wilayah Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara”. Vol. 14 No. 1. Jurnal Ilmiah. (tt. Januari 2018).

Mujiburohman, Dian Aries. “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”. Jurnal Ilmiah. (Yogyakarta, Mei 2018).

Kominfo. Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan akan Sesuai Target. Artikel diakses tanggal 11 Februari 2019 dari https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Laman web diakses tanggal 02 Mei 2019 dari <http://www.atrbpn.go.id>.

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 185/KEP-14.01/VII/2017.

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 265/KEP-14.01/VIII/2017.

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 169/KEP-14.01/V/2017.

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 229/KEP-14.01/VII/2017.

Heri, Kasubsi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, *Wawancara*, Senin 1 Juli 2019.

Supriadi, Kepala Seksi Penataan Petanahan, *Wawancara*, Kamis 9 Mei 2019.

Budi Hamdani, Petugas Ukur, *Wawancara*, Jumat 10 Mei 2019.

Al Hadri, Kepala Desa Kasikan, *Wawancara*, Kasikan, Rabu 5 Februari 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANGKET MENGENAI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA KASIKAN TAHUN 2017

Identitas Peneliti

Nama: Murkastari

Jurusan: Ilmu Hukum

Universitas: UIN Sultan Syarif Kasim Riau

II. Keterangan dan Petunjuk Pengisian

1. PTSL adalah program pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yang pelaksanaannya difokuskan untuk satuan desa/ kelurahan.
2. PTSL di Desa Kasikan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar juga diharuskan melakukan sosialisasi pada setiap desa/kelurahan mengenai program ini.
PTSL adalah program yang dilaksanakan menggunakan pembiayaan dari Daftar Isian Program Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 yang telah dianggarkan oleh negara, dengan demikian tidak adanya pungutan biaya dalam kegiatan tersebut.
Akan tetapi, walaupun pada dasarnya program PTSL ini tidak dipungut biaya. Pihak desa/kelurahan masih diperbolehkan memungut biaya berupa biaya materai, pemasangan patok/tanda batas, dan transportasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Program PTSL tersebut telah dilakukan di desa Kasikan dimulai dari awal tahun 2017, dengan demikian sudah berjalan kurang lebih 2 tahun.

ANGKET INI TIDAK MEMBERIKAN PENGARUH SECARA LANGSUNG KEPADA PROGRAM PTSL DI DESA KASIKAN, INI HANYA PENELITIAN UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI EVALUASI.

BERIKAN TANDA (✓) PADA PILIHAN JAWABAN YANG ANDA ANGGAP BENAR DI BAWAH INI!

III. Pertanyaan

1. Pernahkah anda melakukan pendaftaran tanah sebelum diadakannya program PTSL ini?

- a. Tidak Pernah
- b. Pernah

Apakah anda ikut serta dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar?

- a. Tidak ikut serta
- b. Ikut serta

Apakah anda sebagai peserta/ pemohon PTSL hadir pada saat pelaksanaan pengumpulan data fisik?

- a. Tidak hadir
- b. Hadir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana pendapat anda sebagai peserta/ pemohon PTSL tentang pelaksanaan pengumpulan data yuridis?

- a. Tidak sulit
- b. Sedikit sulit
- c. Sulit

Apakah anda sudah menerima hasil dari program tersebut berupa sertifikat hak atas tanah?

- a. Belum menerima
 - b. Sudah menerima
6. Sudahkah anda merasa puas mengenai kinerja panitia PTSL dalam melaksanakan tugasnya?
- a. Belum puas
 - b. Kurang puas
 - c. Sudah puas

Setelah anda mengikuti sosialisasi yang diadakan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, apakah anda merasa mendapatkan pemahaman yang baik dari sosialisasi tersebut?

- a. Tidak paham
- b. Kurang paham
- c. Paham

Apakah anda mengetahui jika program PTSL ini tidak dipungut biaya dalam pelaksanaannya?

- a. Tidak mengetahui



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

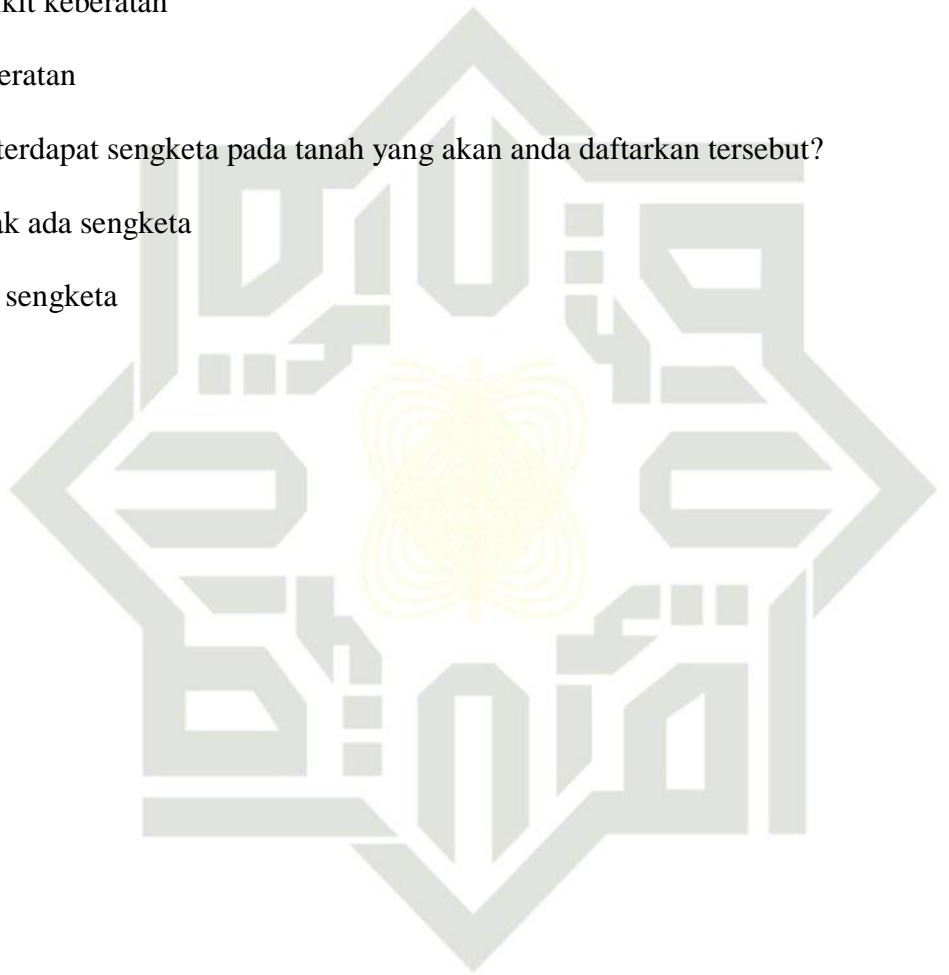
b. Mengetahui

Bagaimana pendapat anda sebagai peserta/ pemohon PTSL tentang biaya yang dibebankan pihak Desa Kasikan kepada anda tersebut?

- a. Tidak keberatan
- b. Sedikit keberatan
- c. Keberatan

10. Apakah terdapat sengketa pada tanah yang akan anda daftarkan tersebut?

- a. Tidak ada sengketa
- b. Ada sengketa



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

PERTANYAAN UNTUK KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR

1. Apakah yang dimaksud program PTSL dan kapan itu dimulai?

2. Bagaimana cara menetapkan lokasi pelaksanaan program PTSL?

3. Apakah ada panitia khusus untuk untuk Program PTSL tersebut?

4. Bisa anda jelaskan mengenai pelaksanaan PTSL tersebut secara singkat dan rinci?

5. Apakah ada sosialisai yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mengenai program PTSL ini?

6. Saya mendengar bahwa program PTSL ini tidak dipungut biaya, apakah benar?

7. Dari mana asal anggaran untuk program PTSL tersebut?

8. Bolehkah ada biaya lain selain anggaran tersebut dan adakah peraturannya?

9. Dalam hal pembagian sertifikat apakah dilaksanakan langsung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar?

10. Adakah kendala dalam melaksanakan program PTSL tersebut yang ditemukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar?

11. Jika terjadi pelanggaran, bagaimana wewenang Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PANITIA DESA KASIKAN (KEPALA DESA KASIKAN)

- Kapan keterangan mengenai program PTSL ini sampai di Desa Kasikan?
- Bagaimana fungsi desa dalam program PTSL tersebut?
- Adakah panitia khusus dalam melaksanakan program PTSL tersebut?
- Berapa kuota sertifikat hak atas tanah yang didapat oleh Desa Kasikan?
- Adakah kendala selama pelaksanaan program PTSL di Desa Kasikan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul **Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 di Desa Kasikan** yang ditulis oleh:

Nama : Murkastari
NIM : 11427204038
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Oktober 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, S.H, M.H

Sekretaris
Musrifah, S.H, M.H

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.A

Penguji II
Peri Pirmansyah, S.H, M.H



Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum



Erni, S.Sos, M.M
NIP. 19680226 199103 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web <http://fasih.uin-suska.ac.id>, E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/957/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : *Mohon Izin Melakukan PraRiset*

Pekanbaru, 30 Januari 2019

Kepada
Yth.
Kantor Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar
di
Tempat

Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarokatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : MURKASTARI
NIM : 11427204038
Semester/Tahun : X (Sepuluh)/ 2019
Program Studi : Ilmu Hukum S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan
Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 7005

- Han Uripa Ummuung Umuang-Umuang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA KASIKAN KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR, ditulis oleh saudara :

Nama	: MURKASTARI
NIM	: 11427204038
Program Studi	: Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :	
Hari / Tanggal	: Selasa / 12 Maret 2019
Narasumber	: SYAFRINALDI, SH, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Maret 2019

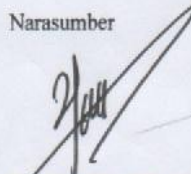
Kepala Sub. Bagian Akademik



Aspendi, S.Ag., M.Si

NIP. 19610918 19803 1 002

Narasumber



Syafrinaldi, SH, MA

NIP. 19810923 200604 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.1/PP.01.1/4744/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MURKASTARI
NIM : 11427204038
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 18 APRIL 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 17 Mei 2019
Dekan,


H. Hajar, M.Ag
NIR.198307121986031005

- Han Uipya Ummuulunggi Ummuulunggi Ummuulunggi
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH

Nomor : Un.04/F.1.3/PP.00.9/9030/2019

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MURKASTARI
N I M : 11427204038
Tempat Tgl. Lahir : kasikan, 09 Juni 1996
Jurusan /Semester : Ilmu Hukum S1 / XI (Sebelas)
Alamat : Jl Raya Bangkinang Pekanbaru

adalah benar Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Akademik 2019-2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 07 November 2019

a.n. Dekan

Wakil Dekan III

Dr. H. Maghfirah, MA

NIP : 19741025 200312 1 0024

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau

- Han Uipya Ummuulunggi Ummuulunggi
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/20595
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2508/2019 Tanggal 21 Maret 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

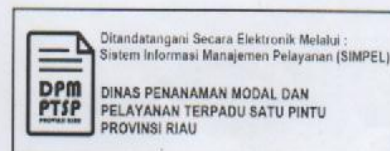
1. Nama : MURKASTARI
2. NIM / KTP : 11427204038
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA KASIKAN KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR
7. Lokasi Penelitian : BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAMPAR

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Maret 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/345

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-Riset /20595 tanggal 21 Maret 2019, dengan ini Rekomendasi/Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MURKASTARI |
| 2. NIM | : | 11427204038 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU |
| 4. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA KASIKAN KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : | BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di buat.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 26 April 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi. Kesatuan Bangsa



ONITA, SE

Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Berangkutan

- Han Uripa Uinmuang Uinuang-Uinuang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang e-mail. kantahkampar@gmail.com Kode Pos 28412

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1440 / Ket - 14.01 / V / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : GUSTI AYU TRISNAWATI, SE
NIP : 19720712 199803 2 002
Pangkat/Gol : Penata TK I – III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUSKASTARI
N I M : 11427204038
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian untuk mengumpulkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, yang akan digunakan untuk menyusun Skripsi yang berjudul ***Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.***

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 10 Mei 2019

An.KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Tata Usaha





RIWAYAT PENULIS

MURKASTARI, lahir di Desa Kasikan pada tanggal 09 Juni 1996. Anak kedua dari tiga bersaudara ini adalah putri dari H. Abdul Manap dan Hj. Darwisyah. Saat ini penulis tinggal di RT/RW: 003/001 Dusun IV Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 002 Kasikan dan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di MTS LKMD Kasikan dan lulus pada tahun 2011, setelah itu penulis melanjutkan di SMAN 1 Tapung Hulu dan lulus pada tahun 2014.

Pada tahun yang sama penulis diterima pada Perguruan Tinggi yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) melalui jalur Ujian Mandiri di Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum yang kemudian memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada Juli-Agustus 2017 penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Setelah itu, pada Juli-Agustus 2018 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Pada Desember 2018, penulis melakukan Penelitian Kelompok (PK) sebagai syarat mengajukan judul untuk penelitian skripsi. Pada tahun 2019 penulis mulai melakukan penelitian untuk skripsi dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 di Desa Kasikan.

Pada Selasa, 12 Maret 2019 penulis dijadwalkan melaksanakan Seminar Proposal. Setelah itu pada rentang waktu 18 April – 18 Mei 2019, penulis dijadwalkan melaksanakan ujian Komprehensif. Terakhir, pada Selasa, 15 Oktober 2019 penulis dijadwalkan melaksanakan Ujian Munaqasyah (Skripsi) dan dinyatakan “LULUS” dan berhak menerima gelar S.H (Sarjana Hukum).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.